



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9081-9100

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sefhvira Chilly Bella Tiara Sedek^{1✉}, Eny Kusumawati²

Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: B200190306@student.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi terkait keuangan pemerintah daerah secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020. Jumlah populasi sebanyak 73 Kabupaten/Kota dengan 292 observasi. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel *leverage*, tingkat kekayaan daerah, dan pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *leverage*, tingkat ketergantungan, temuan audit, pajak daerah, kinerja keuangan

Abstract

The government is obliged to provide information related to local government finances transparently to the public, so that the public can provide an assessment of the financial performance of local governments which can be an evaluation for local governments. This study aims to determine the effect of leverage, level of regional wealth, level of dependence on the center, BPK audit findings, and local tax revenue on local government financial performance in regencies/cities in Central Java and East Java Provinces in 2017-2020. The total population is 73 regencies/cities with 292 observations. Researchers used multiple linear regression analysis. The results of this study are the variables of the level of dependence on the center and BPK audit findings have an effect on local government financial performance, while the variables of leverage, level of regional wealth, and local tax revenue have no effect on local government financial.

Keyword: *leverage, level of dependence, audit findings, tax revenue, financial performance*

PENDAHULUAN

Masa sentralisasi telah berakhir, Indonesia telah memasuki masa desentralisasi dan memasuki era otonomi daerah dengan dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Setelah itu diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah. Kemudian diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah pusat memberikan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala kepentingan daerahnya secara mandiri. Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengawasi keseluruhan pembangunan daerah umumnya berujung pada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dengan mandiri seluruh kepentingan daerahnya.

Penerapan kebijakan otonomi daerah menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah secara mandiri yang diperoleh melalui pemanfaatan potensi daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian tercermin dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), seperti kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan

dan meningkatkan pelayanan sosial masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masing-masing daerah dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembangunan daerah.

APBD adalah kerangka politik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter, seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan yang akan dilaksanakan. APBD merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala daerah dengan penghargaan daerah dan disusun sesuai visi dan misi serta rencana kerja pemerintah yang disusun secara objektif (tidak memihak) dan melibatkan seluruh komponen pemerintah. APBD adalah satuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan dan penerimaan keuangan yang merupakan program/kegiatan, sedangkan belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang merupakan belanja dan pengeluaran keuangan yang merupakan masukan untuk melaksanakan program/kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan yang disusun dalam APBD untuk mencapai tujuan, pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan aset yang telah dimiliki oleh daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (Perubahan Kedua Dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), Tentang Kinerja, kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang kuantitas dan kualitas nya terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dipergunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis dan Saputra, 2014).

Kinerja keuangan adalah salah satu gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang diartikan sebagai hasil yang dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Kinerja keuangan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah untuk menetapkan aturan pelaksanaan dengan baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk melakukan investasi pada daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan hasil laporan keuangan daerah yang ditinjau oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kinerja keuangan pemerintah merupakan ukuran kinerja utama yang menggunakan indikator keuangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti

memfokuskan pada lima variabel yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu: *leverage*, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah.

Dalam akuntansi sektor publik, *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam rasio *leverage* penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010). Penelitian Sumarjo (2010) memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan pemda diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Tingginya tingkat kekayaan daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berjalan dengan baik. Penelitian Dasmardik (2020), memberikan bukti empiris bahwa tingkat kekayaan daerah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pusat menjadi salah satu indikator lain yang dapat memengaruhi kinerja pemda. Dilihat dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari pendapatan yang berasal lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat. Semakin besar DAU yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan alokasi. Dengan pemantauan yang tinggi oleh pemerintah pusat, maka memotivasi pemerintah daerah dalam memberikan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (Sumarjo, 2010). Penelitian Wijayanti dkk (2020), memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK merupakan suatu masalah yang muncul selama proses audit dan layak untuk diangkat dan dikomunikasikan kepada auditee karena dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit BPK RI atas pelaporan keuangan pemerintah daerah menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah (Badan Pemeriksa

Keuangan, 2018). Penelitian Masdiantini & Erawati (2016) dan Ditasari & Sudrajat (2020), memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dan utama PAD akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Penelitian Florida (2007), memberikan bukti empiris pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni dan Adi (2020). Penelitian ini menggunakan variabel *leverage*, tingkat kekayaan, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah untuk lebih memperluas daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta lebih memperluas pengamatan selama periode 2017-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan merupakan sebuah konsep yang muncul interaksi atau sebuah hubungan antara suatu pihak sebagai prinsipel dan pihak lain sebagai agen. Hubungan tersebut berkaitan dengan penyediaan jasa dari pihak agen sehingga prinsipel dikatakan sebagai "penyewa" akan mendelegasikan wewenang terhadap agen.

Keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang didalamnya terdapat segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan perundang-undangan selama satu tahun periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Perwitrasari (2010), menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri dan membutuhkan dana dari pihak eksternal, sehingga terdapat ketergantungan terhadap pihak luar berkurang dan terlihat semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap. *Leverage* juga menggambarkan struktur modal yang dimiliki suatu perusahaan sehingga terlihat tingkat risiko tidak tertagihnya utang. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka akan memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utama berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi *leverage*, semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah dapat membayar dan menyelesaikan utangnya (Sumarjo, 2010).

Dalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan kreditor untuk mengukur kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengidentifikasi seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus mencari jalan untuk mengurangi utang Sesotyaningtyas (2012).

Kusumawardani (2012) dan Sari & Mustanda (2019), memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₁: *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat kekayaan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Dengan demikian, dapat digunakan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memajukan sumber daya daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kekayaan suatu pemerintahan daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kekayaan suatu daerah maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah pada umumnya di lihat dari peningkatan pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dapat tergambar dari tingkat kekayaan daerah. Tingkat kekayaan daerah dapat digambarkan dengan pendapatan daerah (PAD). PAD perlu di tingkatkan secara optimal untuk mengupayakan peningkatan sumber daya daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD yang sah.

PAD menjadi salah satu sumber yang cukup penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya salah satunya bergantung pada pada PAD, semakin besar PAD maka akan mempermudah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sudarsana & Rahardjo (2013), Utomo (2015), memberikan bukti empiris bahwa tingkat kekayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh tingkat Ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan pada pusat mencerminkan seberapa pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam urusan pembiayaan daerah. Apabila pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat hal tersebut dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki pemerintah daerahnya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah menganggap bantuan dari pemerintah pusat telah cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sehingga mendorong pemerintah daerah untuk tidak meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketergantungan pada pusat tergambar dari seberapa besar dana perimbangan yang

ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020). Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Jika dana perimbangan yang didapat lebih besar dari pendapatan daerah dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut belum maksimal.

Besaran DAU yang didapat suatu daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pada pusat. Pengalokasian DAU dapat diminimalisir dengan cara memaksimalkan peningkatan kapasitas fiskal di tiap daerah otonom. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Penggunaan atau pengalokasian DAU akan selalu diawasi oleh pemerintah pusat dan membuat peningkatan pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Suryaningsih & Sisdyani (2016) serta Qowi & Prabowo (2017), memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Temuan audit BPK yang berisi penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah disebabkan karena pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Jika pemerintah daerah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya maka hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan pemerintah daerahnya menurun.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari audit pemerintahan, karena hal tersebut merupakan aspek terpenting dalam melihat indikasi penyimpangan pada penggunaan dana di pemerintah daerah. BPK bertugas sebagai auditor independen yang membuat penilaian terhadap LKPD pemerintah daerah. Penilaian tersebut yang akan menentukan apakah LKPD pemerintah daerah sudah sesuai. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada LKPD hal tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

BPK memberikan laporan kepatuhan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH). Laporan kepatuhan menjelaskan mengenai ketaatan penggunaan anggaran menurut peraturan yang berlaku (Budiarto & Indarti, 2019). Apabila terdapat temuan pada laporan kepatuhan dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan pada realisasi anggaran yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Qowi & Prabowo, 2017).

Akuntabilitas laporan keuangan yang tidak sesuai menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak baik. Nugraheni & Adi (2020) dan Mustikarini & Fitriyani (2012), memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₄: Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan UU jika tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan sumber-sumber kekayaan pendapatan asli daerah atau PAD yang harus selalu dikelola pertumbuhannya (Wenny, 2012). Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan pajak daerah merupakan sumber PAD yang digunakan untuk pembangunan wilayah dan integritas masyarakat (Sesotyaningtyas, 2012). Pendapatan pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan utama PAD untuk membiayai segala pembiayaan kegiatan (operasional) daerah (Ningsih, 2010). Hal ini yang membuat pendapatan pajak daerah penting dan dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Florida (2007), Darwanis dan Saputra (2014), memberikan bukti empiris bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

H₅: Pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik. Populasi penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah ditambah 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur dengan rentang waktu empat tahun dimulai dari tahun 2017-2020. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh sehingga semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat dalam situs resmi Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis.

Penelitian ini menghitung rasio pertumbuhan modalnya menggunakan komponen belanja modal untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin

meningkatnya belanja modal menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Pada umumnya, proporsi belanja daerah dengan belanja modal adalah antara 5-20%. Rumus rasio pertumbuhan belanja modal, sebagai berikut: (Halim, 2013)

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{BM_t - BM_{t-1}}{BM_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

BM_t = Total Belanja Modal yang dihitung pada tahun ke-t

BM_{t-1} = Total Belanja Modal yang dihitung pada tahun sebelumnya.

Leverage dapat diukur dengan menggunakan *debt to equity*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan semakin rendah *leverage* maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Rumus dalam menentukan *leverage* adalah: $\text{Leverage} = \text{Kewajiban} / \text{Ekuitas}$ (Cohen, 2006).

Tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Proksi ini dipilih agar perbandingan tingkat kekayaan antar daerah merata dan adil karena setiap daerah memiliki jumlah PAD yang berbeda-beda berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap daerah (Halim, 2013). Formula untuk menentukan: $\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$.

Tingkat ketergantungan pada pusat diukur dengan membandingkan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total pendapatan daerah. Adanya DAU berfungsi untuk menghindari ketimpangan fiskal antar daerah dan dapat menyediakan sumber keuangan daerah. Rumus: $\text{Tingkat Ketergantungan pada pusat} = \text{DAU} / \text{Total Pendapatan Daerah}$ (Halim, 2013).

Temuan audit BPK suatu daerah dapat diketahui dengan melihat hasil opini audit BPK, jika BPK memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan skor satu, opini tidak wajar diberikan skor dua, opini wajar dengan pengecualian diberikan skor tiga, dan opini wajar tanpa pengecualian diberikan skor empat (Halim, 2008).

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Rumus dalam menentukan pendapatan pajak daerah adalah $\text{In (Pendapatan Pajak Daerah)}$.

HASIL DAN PEMABAHASAN

Tabel 1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Kinerja Keuangan	236	-0,7426	0,6193	-0,0851	0,2600
<i>Leverage</i>	236	0,0004	0,4785	0,0104	0,0315
Tingkat Kekayaan Daerah	236	0,0797	0,5690	0,1706	0,0581
Tingkat Ketergantungan	236	0,1600	0,5207	0,4447	0,0441
Temuan Audit BPK	236	2	4	3,99	0,130
Pendapatan Pajak Daerah	236	23,8143	28,8180	25,2490	0,7461

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah analisis sebanyak 236 observasi dalam pengamatan selama empat tahun, yaitu tahun 2017-2020. Nilai rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah -0,0851 artinya pertumbuhan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur selama periode tahun 2017-2020 rata-rata mengalami penurunan sebesar 8,5%. Nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,0104 yang artinya rata-rata rasio *leverage* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur selama periode tahun 2017-2020 sebesar 0,0103945.

Nilai rata-rata tingkat kekayaan daerah yang diprosikan dengan rasio PAD dibagi total pendapatan daerah sebesar 0,1706 yang artinya proporsi PAD yang dimiliki oleh pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada periode tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 17,06% dari total pendapatan daerah periode tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan rata-rata tingkat kekayaan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 17,06%, total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 17,06% berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Nilai rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat sebesar 0,4447 yang artinya proporsi DAU yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 rata-rata sebesar 44,47% dari total pendapatan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 44,47%. Total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 44,47% berasal dari dana alokasi umum (DAU).

Nilai rata-rata temuan audit BPK sebesar 3,99 artinya, selama tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa rata-rata memperoleh opini pada pemerintah kabupaten/ kota di

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 rata-rata memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Nilai rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 25,2490 artinya, rata-rata dari pendapatan pajak daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur selama periode tahun 2017-2020 sebesar 2524,90%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata tingkat pendapatan pajak daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 2524,90%. Total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 2524,90%.

Hasil uji asumsi klasik semua terpenuhi, uji normalitas menggunakan *one simple Kolmogorov smirnov*, uji multikolinieritas dengan melihat *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value* dan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Spearman dengan melihat pada tingkat signifikansi hasil regresi nilai *absolute residual*, sehingga dapat dilakukan uji hipotesis dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$KK = -3,187 - 0,311LV - 0,054TKD + 1,911TKP + 0,354TAB + 0,034PPD + e$$

Tabel 2. Hasil Uji Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3,187	1,081		-2,948	0,004
<i>Leverage</i>	-0,311	0,517	-0,038	-0,602	0,548
Tingkat Kekayaan Daerah	-0,054	0,353	-0,012	-0,153	0,879
Tingkat Ketergantungan pada Pusat	1,911	0,485	0,324	3,938	0,000
Temuan Audit BPK	0,354	0,125	0,177	2,830	0,005
Pendapatan Pajak Daerah	0,034	0,032	0,097	1,064	0,288

Berdasarkan tabel 2 disimpulkan bahwa variabel *leverage*, tingkat kekayaan daerah, dan pendapatan pajak daerah menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel *leverage*, tingkat kekayaan daerah, dan pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit BPK menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat ketergantungan

pada pusat dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji adjusted R^2 sebesar 0,087 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 8,7%. Sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji F menunjukkan hasil nilai signifikansi dari uji F sebesar 0,000. Nilai signifikansi pada tabel di atas menghasilkan uji $F < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini sudah fit dan layak digunakan sebagai model penelitian.

Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Rasio *leverage* adalah penilaian besar atau kecilnya jumlah total utang untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintah dalam menjalankan otonominya, yang disesuaikan dengan nominal utang yang dimiliki. Semakin tinggi persentase *leverage*, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin memburuk. *Leverage* merupakan seberapa besar aset yang didanai oleh pinjaman sebab daerah kesulitan dalam mendanai urusan daerah menggunakan modal pribadi. Sumarjo (2010) dan Kusumawardani (2012) memperjelas semakin besarnya *leverage*, tentu kinerja keuangan pemerintah daerah semakin memburuk.

Setelah dilakukan pengujian pada hipotesis penelitian, didapatkan hasil empiris, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rendahnya rasio utang atau *leverage* tidak selalu menjamin tingkat pengembalian laba yang rendah. Begitupun sebaliknya, tingginya rasio utang atau *leverage* tidak menjamin adanya peningkatan profitabilitas yang dihitung menggunakan belanja modal, karena pemerintah daerah tidak bergantung pada utang sebagai sumber dana dalam menjalankan pemerintah daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria & Sari (2018), Azzahra & Nasib (2019), Chadha & Sharma (2015) yang memberikan bukti empiris bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Keberadaan PAD yang kecil mungkin mengindikasikan bahwa daerah sangat bergantung pada sumber pendapatan eksternal, seperti dana perimbangan atau transfer pusat. Hal ini dapat menunjukkan keterbatasan dalam menciptakan pendapatan lokal yang dapat diandalkan dan dapat menghadirkan risiko keuangan jika ada perubahan alokasi dana dari pusat.

Jika kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, tidak memiliki

pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar sudah seharusnya memberikan kinerja keuangan yang baik pula. Apabila pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar tetapi kinerja keuangannya memiliki penilaian buruk maka pemerintah daerah tersebut kedepannya harus melakukan perbaikan dan peningkatan.

Besar kecilnya tingkat kekayaan daerah yang diukur dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata tingkat kekayaan daerah di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 hanya sebesar 17,06125%. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, sehingga tingkat kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Wijayanti & Suryandari (2020) yang memberikan bukti tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pusat, yang dapat diukur melalui Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. DAU sebagai sumber dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung tugas pemerintah daerah, seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam konteks peningkatan kinerja keuangan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi lebih nyata, dengan menekankan penggunaan pendapatan daerah sendiri untuk mencapai efisiensi yang lebih besar.

Melalui analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur selama periode 2020-2022 mencapai sekitar 40,757%. Ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi proporsi ketergantungan pada pusat dalam suatu daerah, semakin besar kemungkinan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan dana transfer dan upaya pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Djuniar dkk (2021) yang

memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Temuan audit BPK diprosikan dengan opini yang diberikan oleh BPK. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP maupun WDP tidak menjamin baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum dapat menjadi faktor penggerak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Temuan audit BPK dapat memengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan ukuran yang digunakan oleh peneliti menggunakan hasil opini BPK, pada penelitian Nugraheni dan Adi (2020) yang menggunakan banyaknya jumlah temuan pelanggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dapat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama jika temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan, penyimpangan, atau masalah pengelolaan keuangan. Temuan audit yang merugikan dapat menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan ukuran yang digunakan oleh peneliti menggunakan hasil opini BPK, pada penelitian Nugraheni dan Adi (2020) yang menggunakan banyaknya jumlah temuan pelanggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Wana & Juniartika (2021) yang memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat. Karakteristik pajak daerah dari berbagai jenis pajak meliputi pajak hotel, hiburan dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai sumber utama dalam memenuhi pendapatan asli daerah sendiri. Semakin tinggi pajak daerah maka semakin baik

kinerja keuangan pemerintah daerah, sebaliknya semakin rendah pajak daerah maka semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan pajak daerah merupakan sumber PAD yang digunakan untuk Pembangunan Wilayah dan Integritas Masyarakat (Sesotyaningtyas, 2012). Pendapatan pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan utama PAD untuk membiayai segala pembiayaan kegiatan (operasional) daerah (Ningsih, 2010). Hal ini yang membuat pendapatan pajak daerah penting dan dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah

Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu PAD yang digunakan untuk membangun daerah serta akan dikembalikan kepada masyarakat. Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, rendahnya jumlah wajib pajak aktif, atau kebijakan pajak daerah yang kurang efektif. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program dan proyek yang mendukung pembangunan daerah

Menurut Fitriani (2016) pendapatan pajak daerah tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan semakin tinggi pendapatan pajak daerah mengindikasikan semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Wenny (2012) memberikan fakta empiris yang berbeda dengan tidak adanya pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Wiguna & Jati (2019), yang memberikan bukti empiris bahwa pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut: (1) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (4) Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini auditor BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Semakin baik opini auditor BPK, semakin tinggi nilai kinerja keuangan pemerintah daerah. (5) Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya pendapatan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A., & Nasib. (2019). Pengaruh Firm Size Dan Leverage Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan. *JWEM STIE MIKROSKIL*, 9(01).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 2018). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Chadha, S., & Sharma, A. K. (2015). Capital Structure and Firm Performance: Empirical Evidence from India. *SAGE Publications*, 19(4), 295–302.
- Cohen, B. (2006). Urbanization in Developing Countries: Current Trends, Future Projections and Key Challenges For Sustainability. *Technology in Society*, (28), 63–80.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39–57.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104–117.
- Djuniar, L., Sunardi, S., Sari, D., & Satria, E. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(01), 50–61.
- Fitriani, N. (2016). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 85–92. Retrieved from <https://doi.org/10.24964/Ja.V1i2.18>

- Florida, A. (2007). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. (n.d.).
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(2), 1150–1182.
- Mustikarini, & Fitriyani. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Banjarmasin: Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Ningsih, A. T. (2010). Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Solo: Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/5855/>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5(1), 1–10.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (Perubahan Kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), tentang Kinerja. (n.d.).
- Perwitrasari, C. (2010). The Influence of Financial Performance to The Level of accountability Disclosure of Indonesian's Local Government. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. Diponegoro Journal of Accounting, 6(1), 1–13.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan

- Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Doctoral Dissertation, Udayana University.
- Satria, I. ., & Sari, H. . (2018). Pengaruh wealth, intergovernmental revenue, leverage dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal At-Tasyri'*, 10(1), 9–21.
- Sesotyaningtyas. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Sudarsana, & Rahardjo. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). 2(4), 1–13.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453–1481.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Utomo, K. P. (2015). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id>
- Wana, D., & Juniartika, S. (2021). Determinan kinerja pemerintah daerah provinsi di indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi - [SNAV]*, 9(1), 174–192.
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2(1).
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 85–108.
- Wijayanti, I., Mawardi, R., & Halim, A. B. (2020). The Effect of Corporate Social Responsibility

Disclosure, Leverage, Firm Size, and Profitability Toward Earnings Response Coefficient.
Int. J. Innov. Creat. Chang, 13, 1202–1216.

Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1).